

ABSTRAK

Aldi Santika, 1228010022, (2026) Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (Spm) Bidang Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk memastikan terpenuhinya layanan dasar bagi seluruh warga. Namun, pelaksanaan SPM Pendidikan di Kabupaten Sumedang masih menghadapi berbagai hambatan, seperti capaian indikator yang belum merata, keterbatasan sumber daya, serta pemahaman pelaksana yang belum optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan SPM Bidang Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang memengaruhi pencapaian indikator SPM, serta memahami bagaimana pelaksana kebijakan merespons tuntutan penyelenggaraan layanan pendidikan dasar sesuai standar minimum serta memberikan rekomendasi strategis guna memperbaiki mutu dan pemerataan layanan pendidikan di daerah.

Kerangka berpikir penelitian didasarkan pada teori implementasi, implementasi kebijakan, serta teori implementasi kebijakan publik. Model Implementasi Kebijakan Publik George C. Edwards III (1980) yang mencakup empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi digunakan sebagai alat analisis untuk menilai sejauh mana kebijakan SPM Bidang Pendidikan telah dilaksanakan secara konsisten di Kabupaten Sumedang.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, serta triangulasi sumber. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses implementasi kebijakan SPM, termasuk dinamika koordinasi, kesiapan sumber daya, serta peran aktor pelaksana di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Sumedang belum berjalan optimal. Hambatan ditemukan pada aspek komunikasi yang belum efektif, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, pemahaman teknis aparatur yang belum merata, serta struktur birokrasi yang masih tumpang tindih dan kurang terintegrasi. Meskipun capaian SPM mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, sebagian indikator masih berada di bawah target nasional. Diperlukan peningkatan kapasitas pelaksana, penguatan koordinasi lintas unit, pemanfaatan data yang lebih akurat, serta penataan manajemen birokrasi untuk mempercepat pencapaian SPM pendidikan secara menyeluruh.